



RENCANA KERJA TAHUN 2025 PERUBAHAN



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Perubahan mempunyai arti strategis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perubahan terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD s.d. TW I 2025, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 Perubahan dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Purwokerto, 26 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



KRIS SINTA INDIRA KUSUMAWATI, S.STP
Pembina

NIP. 198003151999122001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Lampiran v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s.d. Triwulan I Tahun 2025..... 6

2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ... 43

2.3 Reviu terhadap Renja Tahun 2025..... 44

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 68

3.1 Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 68

BAB IV PENUTUP..... 108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW I
Tahun 2025 8

Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan TW I
Tahun 2025 12

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan sampai dengan TW I
Tahun 2025 24

Tabel 2.4 Reviu terhadap Renja Tahun 2025 46

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banyumas 67

Tabel 3.1 Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025..... 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran c. Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2024 109

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang selanjutnya akan menjadi RKPD/ KUA dan PPAS, serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 Perubahan
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen serta perubahannya, Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Perubahan antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD menyesuaikan dengan Revisi atas Renstra Peralihan OPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-SalatigaDemak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-MagelangTemanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Renja adalah memberikan pedoman bagi program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 Perubahan. Renja ini juga untuk menjabarkan tujuan sasaran dan program pembangunan Daerah yang termuat dalam dokumen Rancangan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2025-2029.

2. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan Penyusunan Renja adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dalam 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- a. Guna memberikan arah pedoman bagi DPMPSTSP dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas fungsinya;
- b. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TW I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan Rancangan Akhir RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Rancangan Akhir Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian DPMPTSP sampai dengan TW I Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja menyajikan dasar pengukuran kinerja yaitu target dan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja tahun berjalan ataupun realisasi dan tingkat capaian berdasarkan renstra.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp 10.163.668.532 terdiri dari :

I. Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp 9.223.172.532
II. Anggaran Urusan Penanaman Modal dan PTSP	: Rp 940.496.000
Jumlah	: <u>Rp 10.163.668.532</u>

Dari jumlah Anggaran Rp 10.163.668.532 telah dilakukan efisiensi anggaran menjadi terealisasi sebesar Rp 9.547.668.532 pada bulan April 2025, dengan komposisi sbb :

I. Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp 8.799.688.532
II. Anggaran Urusan Penanaman Modal dan PTSP	: Rp 747.980.000
Jumlah	: Rp 9.547.668.532

2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW I Tahun 2025

Evaluasi kinerja menyajikan dasar pengukuran kinerja yaitu target dan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja tahun berjalan ataupun realisasi dan tingkat capaian berdasarkan renstra. Analisis kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Dari 2 tujuan telah tercapai 1 tujuan sedangkan 1 belum yaitu nilai investasi daerah tercapai karena laporan LKPM belum rilis dari BKPM serta pencatatan dengan kategori Tahunan atau perbaikan laporan di emonev dengan surat usulan perbaikan capaian indikator kinerja.
2. Dari 2 sasaran telah tercapai 1 sasaran sedangkan 1 belum tercapai yaitu Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya karena laporan mendasarkan dari laporan LKPM belum rilis dari BKPM. Pencatatan dengan kategori Tahunan atau perbaikan laporan di emonev dengan surat usulan perbaikan capaian indikator kinerja.

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW I Tahun 2025

No	Tujuan/ Indikator Kinerja	Perhitug an/Capai an	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s,d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		KET	OPD	
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s,d, Triwulan I					Faktor Penduku ng	Faktor Pengham bat			
Tujuan 1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal																
1	IKM pelayanan terpadu satu pintu	PROGRES POSITIF	%	91	91,72	91,3	93,25	93,25	102,75	SANGAT TINGGI	100,79	SANGAT TINGGI			Bulan Januari dengan nilai 93,75 dan Februari dengan nilai 92,75, sehingga nilai rata-ratanya 93,25		
Tujuan 2	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan																
1	Nilai Investasi Daerah	PROGRES POSITIF	Milyar Rupiah	2400	2423	1400	N/A				100,96				Release dari BKPM akhir triwulan 1 yaitu akhir bulan April,		

No	Aspek/Sasaran/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target	Realisasi	Tahun 2025			Tingkat Capaian	Status	Tingkat Capaian	Status	Identifikasi		KET	OPD
				Akhir RPJMD	Sampai Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I	RKPD 2025 s.d TW I	Capaian 2025	RKPD 2025	Capaian 2025	Thd RPJMD	Triwulan I		
SASARAN 1	Menngoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal															
1.1	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	PROGRES POSITIF	%	97	100.18		100.61	100.61	104.26	SANGAT TINGGI	103.72	SANGAT TINGGI			Realisasi Perizinan terbit bulan Januari dan Februari sejumlah 6590 pelaku usaha, sedangkan Permohonan Pelayanan Perizinan bulan Januari dan Februari sejumlah 6550 pelaku usaha, sehingga dengan mengikuti formulasinya yaitu 6590/6550 x 100% = 100,61%. jadi persentase perizinan terpadu satu	

No	Aspek/Sasaran/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		KET	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
															pintu yang diterbitkan di tw 1 sebesar 100,61%	
SASARAN 2	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya															
2.1	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	PROGRES POSITIF	%	78	107.36		N/A	N/A							Belum ada Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya di TW 1, masih menunggu hasil LKPM TW 1 sebagai angka penyebutnya.	

2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan TW I Tahun 2025

Evaluasi kinerja menyajikan dasar pengukuran kinerja yaitu target dan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja tahun berjalan ataupun realisasi dan tingkat capaian berdasarkan renstra. Berdasarkan tabel 2.2. tersebut dibawah capaian kinerja program dan kegiatan s.d. TW I 2025 sebagai berikut:

1. Dari 6 program telah tercapai 3 program sedangkan 3 belum tercapai yaitu Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah karena belum tercatat. Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal karena belum ada realisasi. Persentase realisasi investasi karena laporan mendasarkan dari laporan LKPM belum rilis dari BKPM Pencatatan 2 indikator terakhir dengan kategori Tahunan atau perbaikan laporan di emonev dengan surat usulan perbaikan capaian indikator kinerja.
2. Dari 12 kegiatan belum tercapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan TW I Tahun 2025

No	Aspek/Program /Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025						Tingkat Capaian RKPD 2025		Status Capaian 2025	Tingkat Capaian	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD		
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi 2025		s.d TW I					RKPD 2025 Thd RPJMD	Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
									s.d. Triwulan I												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp											
PROG RAM 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
	Keuangan					9.223.172.532		726.672.751		726.672.751		7.87									
1. 1	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	98	100			56.25		56.25		58.59		RENDAH	57.4	RENDAH			25% + 0 + 100% + 100% / 4 = 56.25%			
PROG RAM 2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																				

No	Aspek/Program /Indikator Kinerja	Sat uan	Targ et Akhi r RPJ MD	Rea lisa si Sa mp ai Tah un 202 4	Tahun 2025						Tingkat Capaian RKPD 2025		Status Capaian 2025	Tingk at Capai an	Status Capai an 2025	Identifikasi		Ket.	OPD		
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi 2025		s.d TW I					RKPD 2025 Thd RPJM D	Triwul an I			Faktor Pendu kung	Faktor Pengha mbat
					s.d. Triwulan I																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%									
	Keuangan					30.000.000		0		0											
2. 1	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	100	100			100		100			SANGAT TINGGI	100	SANGAT TINGGI			Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik sebesar 100% seluruh data dan informasi (terkait rekap data SKM, Pengaduan, Realisasi Perizinan dan Realisasi Investasi) telah di update dan dipublikasi di website/media sosial.				
PROGRAM 3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																				

No	Aspek/Program /Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025						Tingkat Capaian RKPD 2025		Status Capaian 2025	Tingkat Capaian	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD		
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi 2025		s.d TW I					RKPD 2025 Thd RPJMD	Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
					s.d. Triwulan I																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%									
	Keuangan					240.000.000		4.240.000		4.240.000		1.77									
3. 1	Persentase realisasi investasi	%	97	211.8			N/A		NA		N/A							menunggu rilis BKPM			
PROGRAM 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																				
	Keuangan					368.996.000		24.234.000		24.234.000		6.58									
4. 1	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	97	100			100		100		104.17		SANGAT TINGGI	103.09	SANGAT TINGGI			Jumlah perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dibagi jumlah perizinan berusaha dan non berusaha dikali seratus			

No	Aspek/Program /Indikator Kinerja	Sat uan	Targ et Akhi r RPJ MD	Rea lisa si Sa mp ai Tah un 202 4	Tahun 2025						Tingkat Capaian RKPD 2025		Status Capaian 2025	Tingk at Capai an	Status Capai an 2025	Identifikasi		Ket.	OPD		
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi 2025		s.d TW I					RKPD 2025 Thd RPJMD	Triwul an I			Faktor Pendu kung	Faktor Pengha mbat
									s.d. Triwulan I												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%									
																		persen 6590 / 6590 * 100 = 100 jadi persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Waktu yang ditetapkan di tw 1 sebesar 100			
PROG RAM 5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																				
	Keuangan					216.500.000		0		0		0									
5. 1	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman	%	70	200			100		100		200		SANGAT TINGGI	142.86	SANGAT TINGGI			Terfasilitasi 2 pelaku usaha, dan keduanya lanjut sampai membuat Lol, sehingga			

No	Aspek/Program /Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025						Tingkat Capaian RKPD 2025		Status Capaian 2025	Tingkat Capaian	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi 2025		s.d TW I								
									s.d. Triwulan I										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%							
	modal yang membuat Lol																	perhitungannya : 2/2 x 100% = 100%	
PROGRAM 6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																		
	Keuangan					85.000.000		0		0		0							
6. 1	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	100	0			0		0		0			0	SANGAT RENDAH			Belum ada pelaku usaha yang mengajukan insentif dan kemudahan penanaman modal	

#	No	Aspek/Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		Ket.	OPD
							Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	1.	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKUMULATIF	Dokumen	3	9		1	1	33.33	SANGAT RENDAH	11.11	SANGAT RENDAH			Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di TW 1 yaitu 1 dokumen	DPMTSP
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	1.	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	AKUMULATIF	Laporan	4	12		1	1	25	SANGAT RENDAH	8.33	SANGAT RENDAH			Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di TW 1 yaitu 1 Laporan	DPMTSP
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	1.	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	AKUMULATIF	Bulan	12	36		3	3	25	SANGAT RENDAH	8.33	SANGAT RENDAH			Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tw 1 sebanyak 3 Laporan	DPMTSP

#	No	Aspek/Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d Triwulan I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		Ket.	OPD
							Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	1.	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKUMU LATIF	Jenis	3	6		0	0	0		0				Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di TW 1 sebanyak 0	DPMTSP
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	1.	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKUMU LATIF	Jenis	2	6		0	0	0		0		Tidak ada laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tidak ada laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	DPMTSP
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

#	No	Aspek/Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		Ket.	OPD
							Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKUMU LATIF	Jenis	4	12		1	1	25	SANGAT RENDAH	8.33	SANGAT RENDAH			Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tw 1 sebanyak 1 jenis (1 setiap Tw nya)	DPMTSP
7.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
	1.	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	AKUMU LATIF	Dokumen	0	6		0	0	0		0				Belum ada dokumen pemberian fasilitas insentif PM	DPMTSP
8.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																

#	No	Aspek/Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		Ket.	OPD
							Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	AKUMU LATIF	Dokumen	1	9		0	0	0		0				Belum ada potensi dalam peta potensi yang telah dikaji karena masih menunggu persetujuan nota dinas Pengadaan Barang Jasa	DPMTSP
9.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
	1.	Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan Lol	AKUMU LATIF	Laporan	2	15		2	2	40	SANGAT RENDAH	13.33	SANGAT RENDAH			Telah ada kegiatan Promosi PM yang menghasilkan Lol sebanyak 2 laporan	DPMTSP
10.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																

#	No	Aspek/Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		Ket.	OPD
							Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	AKUMU LATIF	SK	44283	30000		6590	6590	65.9	SEDANG	21.97	SANGAT RENDAH			Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan di TW 1 sebanyak 6590 SK	DPMTSP
11.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
	1.	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	AKUMU LATIF	Buah	1365	834		0	0	0		0				Belum ada Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah, pembinaan dan pengawasan di TW I	DPMTSP
12.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

#	No	Aspek/Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Tingkat Capaian RKPD 2025 Thd RPJMD	Status Capaian 2025 Triwulan I	Identifikasi		Ket.	OPD
							Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I					Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	AKUMU LATIF	Buah	4	12		1	1	25	SANGAT RENDAH	8.33	SANGAT RENDAH			Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website terdiri dari 1 data informasi perizinan dan non perizinan di Tw I. Antara lain data Realisasi Perizinan, Realisasi Investasi, SKM dan Pengaduan	DPMTSP

1.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan sampai dengan TW I Tahun 2025

Evaluasi kinerja menyajikan dasar pengukuran kinerja yaitu target dan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja tahun berjalan ataupun realisasi dan tingkat capaian berdasarkan renstra. Dari 32 sub kegiatan telah tercapai 8 sub kegiatan sedangkan 24 belum tercapai. Sehingga perlu upaya dan pengendalian lagi agar sub kegiatan yang kinerjanya belum tercapai dapat dilakukan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan, agar pada akhir tahun dapat tercapai kinerjanya. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan sampai dengan TW I Tahun 2025

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
Sub Kegiatan 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	AKUM ULATIF	Dokumen	3		0	0	0				Belum ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun di TW 1	DPMPTSP
Sub Kegiatan 2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	1.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKUM ULATIF	Laporan	2		1	1	33.33	SANGAT RENDAH			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di TW 1 yaitu 1 Laporan	DPMPTSP
Sub Kegiatan 3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	AKUM ULATIF	Orang/bulan	128		38	38	122.58	SANGAT TINGGI			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di TW 1 sebanyak 38 orang	DPMPTSP
Sub Kegiatan 4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	AKUM ULATIF	Dokumen	12		3	3	25	SANGAT RENDAH			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di TW 1 sebanyak 3 Dokumen.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	AKUM ULATIF	Paket	8		0	0	0				Belum ada Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di Tw 1	DPMPTSP

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
Sub Kegiatan 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	1.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	AKUM ULATIF	Paket	4		12	12	300	SANGAT TINGGI			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di TW 1 sebanyak 12 Paket	DPMPTSP
Sub Kegiatan 7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
	1.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	AKUM ULATIF	Paket	69		13	13	65	RENDAH			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 13 Paket	DPMPTSP
Sub Kegiatan 8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	AKUM ULATIF	Paket	117		53	53	441.67	SANGAT TINGGI			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di TW 1 sebanyak 53 Paket	DPMPTSP

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
Sub Kegiatan 9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	1.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	AKUM ULATIF	Paket	23306		8	8	0.04	SANGAT RENDAH			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan di Tw 1 sebanyak 8 paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan meliputi dokumen fotocopy, banner dan dokumen cetak lainnya	DPMPTSP
Sub Kegiatan 10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	AKUM ULATIF	Laporan	72		8	8	4	SANGAT RENDAH			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di TW 1 sebanyak 8 Laporan	DPMPTSP
Sub Kegiatan 11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
	1.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	AKUM ULATIF	Dokumen	13596		357	357	14.88	SANGAT RENDAH			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di TW 1 sebanyak 357 Dokumen.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	1.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	PROGRES POSITIF	Unit	14		0	0	0				Belum ada Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan di Tw 1.	DPMPTSP
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
13														
	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	AKUM ULATIF	Laporan	12		17	17	141.67	SANGAT TINGGI			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 17 Laporan	DPMPTSP
Sub Kegiatan 14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	AKUM ULATIF	Laporan	12		16	16	41.03	SANGAT RENDAH			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan di TW 1 sebanyak 16 laporan	DPMPTSP
Sub Kegiatan 15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PROGRES POSITIF	Unit	46		22	22	200	SANGAT TINGGI			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di TW 1 sebanyak 22 Unit	DPMPTSP
Sub Kegiatan 16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PROGRES POSITIF	Unit	26		4	4	6.06	SANGAT RENDAH			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara di TW 1 sebanyak 4 unit	DPMPTSP
Sub Kegiatan 17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PROGRES POSITIF	Unit	2		2	2	100	SANGAT TINGGI			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di TW 1 sebanyak 2 unit	DPMPTSP
Sub Kegiatan 18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PROGRES POSITIF	Unit	2		2	2	100	SANGAT TINGGI			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di TW 1 sebanyak 2 unit.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 19	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	AKUM ULATIF	Dokumen	0		0	0	0				Belum ada Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah di TW 1	DPMPTSP
Sub Kegiatan 20	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
	1.	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	AKUM ULATIF	Dokumen	1		0	0	0				Belum ada Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota di TW 1, masih berupa draft.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 21	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	AKUMULATIF	Dokumen	1		0	0	0				Belum ada Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota di TW 1, masih menunggu persetujuan nota dinas Pengadaan Barang Jasa	DPMPTSP
Sub Kegiatan 23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	AKUM ULATIF	Dokumen	8		1	1	50	SANGAT RENDAH	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota di TW 1 yaitu 1 dokumen (Laporan hasil kegiatan promosi pada Pameran Inacraft 2025)		Laporan hasil kegiatan promosi pada pameran Inacraft 2025	DPMPTSP
Sub Kegiatan 22	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1.	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	AKUM ULATIF	Dokumen	1		0	0	0				Belum ada Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota di TW 1.	DPMPTSP

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
Sub Kegiatan 27	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
	1.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	AKUMULATIF	Dokumen	0		0	0	0				Belum ada Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota di TW 1	DPMPTSP
Sub Kegiatan 24	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	AKUMULATIF	Pelaku Usaha	44203		6550	6550	65.5	SEDANG			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik di TW 1 sebanyak 6550 Pelaku Usaha	DPMPTSP
Sub Kegiatan 26	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	AKUMULATIF	Pelaku Usaha	2386		785	785	392.5	SANGAT TINGGI			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik di TW 1 sebanyak 785 Pelaku usaha. Hal ini terjadi karena antusias pelaku usaha dalam melakukan konsultasi di klinik OSS cukup tinggi, sehingga perlu adanya penyesuaian target tahunan.	DPMPTSP
Sub Kegiatan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
25														
	1.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	AKUMULATIF	Kegiatan Usaha	238		37	37	154.17	SANGAT TINGGI			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha di TW 1 sebanyak 37 Pelaku Usaha.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 28	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	AKUM ULATIF	Kegiatan Usaha.	23		0	0	0				Belum ada Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya di TW 1.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 29	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	AKUMULATIF	Pelaku Usaha	1365		35	35	13.36	SANGAT RENDAH			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risik di TW 1 sebanyak 35 Pelaku Usaha.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 30	Pengawasan Penanaman Modal													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	AKUMULATIF	Kegiatan Usaha	116		6	6	31.58	SANGAT RENDAH			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di TW 1 sebanyak 6 Kegiatan Usaha.	DPMPTSP
Sub Kegiatan 31	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

#	No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2024	Tahun 2025			Tingkat Capaian RKPD 2025 s.d TW I	Status Capaian 2025	Identifikasi		Ket.	OPD
						Target 2025	Realisasi 1	Realisasi 2025 s.d. Triwulan I			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
	1.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	AKUMULATIF	Dokumen	4		1	1	25	SANGAT RENDAH			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan di TW 1 yaitu 1 Dokumen	DPMPTSP

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Masalah Pokok terdiri atas:
 - a. Belum Optimalnya pelayanan penanaman modal.
 - b. Belum optimalnya Investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Masalah terdiri atas:
 - a. Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha
 - b. Investasi yang ditawarkan masih kurang menarik minat investor.
3. Akar Masalah terdiri atas:
 - a. Ketepatan waktu penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha yang belum sesuai waktu yang ditetapkan.
 - b. Kegiatan Usaha yang memenuhi Kriteria belum memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha.
 - c. Belum optimalnya pengendalian terhadap realisasi penanaman modal.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan Data perizinan berusaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - e. Promosi investasi yang belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka isu strategis DPMPTSP Kabupaten Banyumas adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

2. Peningkatan Investasi Daerah

2.2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari atas Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan;
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. Jabatan Fungsional.

2.3 Reviu terhadap Renja Tahun 2025

DPMPTSP mempunyai 6 program dan 12 kegiatan dengan 32 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 Perubahan. Namun demikian akan ada perbedaan antara rancangan awal Renja OPD dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan lewat mekanisme pembahasan melalui musrenbang antara Pimpinan OPD, Banggar Dewan dan TAPD Kab. Banyumas. Dengan anggaran yang terbatas tersebut maka anggaran disesuaikan kembali

berdasarkan telaahan bersama Bappeda. Renja Tahun 2025 Perubahan sudah pada tahap Pra RKA pada bulan Juni 2025 Perubahan melalui aplikasi SIPD Kemendagri.

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2025 Perubahan telah dilakukan, hal ini berkaitan indikator kinerja serta target indikatornya serta kebutuhan dana untuk pencapaian target kinerja dengan ketersediaan dana yang ada, sehingga diperoleh hasil bahwa penetapan pagu anggaran sementara menyesuaikan dengan anggaran keseluruhan di tingkat kabupaten serta dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kemampuan daerah.

Setelah dilakukan review maka dilakukan analisis bersama antara Bappeda dengan OPD DPMPTSP dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran terhadap pencapaian target kinerja. Sehingga pencapaian kinerja tetap dapat optimal berdasarkan dana yang ada.

Proses review ini dilakukan dengan alasan untuk menghasilkan anggaran yang akurat dan tepat sasaran, serta diharapkan akan terjadinya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Program dan Anggaran.

Dengan review ini juga diharapkan akan menghasilkan program anggaran yang akuntabel, sehingga akan memudahkan dalam pencapaian kinerja dan pelaporannya.

Dalam penyusunan Renja OPD, DPMPTSP menggunakan pola berdasarkan kebutuhan untuk penanganan masalah pelayanan perizinan dan penanaman modal. Berdasarkan kebutuhan dapat direncanakan target kinerja Program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu anggaran Renja/RKPD sebelum perubahan sebesar Rp 10.163.668.532, perubahan anggaran karena efisiensi sebesar Rp 9.547.668.532. Serta hasil audiensi dengan Bupati Banyumas dan rapat pembahasan dengan DPRD Kabupaten Banyumas terkait pembenahan sarpras di MPP Banyumas diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 815.710.000, sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 10.363.378.532. Dengan dasar kebutuhan anggaran dimaksud yang diajukan melalui nota dinas ke TAPD Kab. Banyumas, maka tinggal menunggu penetapan KUA PPAS oleh TAPD Kab. Banyumas dengan nilai berdasarkan analisis dan kemampuan daerah sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun 2025 Perubahan.

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan Renja DPMTSPSP Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu terhadap Renja Tahun 2025

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					10.163.668.532		10.663.378.532
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.163.668.532		10.663.378.532
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.163.668.532		10.663.378.532
					Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal		IKM pelayanan terpadu satu pintu	91,72	90,75	368.996.000	90,75	300.596.000
					Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan		Nilai investasi daerah	2423	2800	9.794.672.532	2800	10.512.782.532

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
					Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal		Persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	100,18	98	368.996.000	98	300.596.000
					Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya		Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	107,36	97	9.794.672.532	97	10.512.782.532
2	18	01			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	97 %	97 %	9.223.172.532	3,51 4,2 87,5 97 Nilai Nilai Nilai %	9.865.398.532
2	18	01	2.01		Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	21.973.000	3 Laporan	17.413.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.01	00 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokume n	12.444.000	3 Dokume n	10.164.000
2	18	01	2.01	00 07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.529.000	3 Laporan	7.249.000
2	18	01	2.02		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		undefine d undefine d	5.526.438.532	undefine d undefine d	5.526.438.532
2	18	01	2.02	00 01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bul an	31 Orang/b ulan	5.461.458.532	47 Orang/b ulan	5.461.458.532
2	18	01	2.02	00 02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokume n	64.980.000	12 Dokume n	64.980.000
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
2	18	01	2.03		Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.03		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian						
2	18	01	2.06		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	1.081.374.300	12 bln	720.613.108
2	18	01	2.06	00 01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	15 Paket	8.000.000	6 Paket	8.000.000
2	18	01	2.06	00 02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 Paket	53.128.500	4 Paket	50.628.500
2	18	01	2.06	00 03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	69 paket	20 Paket	17.121.000	4 Paket	17.120.608

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.06	00 04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	117 paket	12 Paket	394.074.500	12 Paket	360.204.500
2					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	NON URUSAN				10.163.668.532		9.547.668.532
2	18				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				10.163.668.532		9.547.668.532
2	18	01			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	9.223.172.532	-	8.799.688.532
2	18	01	2.06		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	1.081.374.300	-	1.081.374.300
2	18	01	2.06	00 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.06		Tersedianya Mebel	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.163.668.532		9.547.668.532
2	18				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				10.163.668.532		9.547.668.532
2	18	01			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	9.223.172.532	-	8.799.688.532
2	18	01	2.06		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	1.081.374.300	-	1.081.374.300
2	18	01	2.06	00 05	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23306 paket	20000 Paket	46.232.500	12	39.813.400
2	18	01	2.06	00 09	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	200 Laporan	543.367.800	60 Laporan	225.396.100

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.06	00 10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13596 dokumen	2400 Dokume n	19.450.000	2400 Dokume n	19.450.000
2	18	01	2.07		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	9.000.000	-	781.000.000
					Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel						0
2	18	01	2.07	00 06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	2 Unit	9.000.000	22	781.000.000
2	18	01	2.07	00 10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	4 Unit	0	4 Unit	0

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.08		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	2 jenis	2.279.860.700	2 jenis	2.221.697.892
2	18	01	2.08	00 02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	398.378.000	12 Laporan	393.378.000
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0
2	18	01	2.08	00 04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39 Laporan	1.881.482.700	12 Laporan	1.828.319.892

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.09		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis	4 jenis	304.526.000	4 jenis	598.236.000
2	18	01	2.09	00 02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	11 Unit	81.536.000	11 Unit	81.536.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	01	2.09	00 06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	66 Unit	72.070.000	66 Unit	78.070.000
2	18	01	2.09	00 09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	100.100.000	2 Unit	387.810.000
2	18	01	2.09	00 10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	50.820.000	2 Unit	50.820.000
2	18	01	2.09	11	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel						
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		Persentase peningkatan investasi daerah					

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
							Nilai Investasi Daerah					
							Nilai IKM penanaman modal					
2	18	02			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	100%	100 %	85.000.000	100 %	74.740.000
2	18	02	2.01		Optimalnya penyusunan kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	0 dokumen	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	14.832.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
					Optimalnya kegiatan kemitraan berusaha							
2	18	02	2.01	00 01	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
2	18	02	2.01	00 03	Terlaksananya Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0 dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	14.832.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	02	2.02		Optimalnya kajian potensi investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	1 dokumen	3 dokumen	65.000.000	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	59.908.000
2	18	02	2.02	00 01	Tersedianya peraturan daerah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 Dokume n	25.000.000	1 Dokume n	23.480.000
2	18	02	2.02	00 04	Tersedianya peta potensi dan investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 Dokume n	40.000.000	1 Dokume n	36.428.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	03			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat LoI	200%	60 %	216.500.000	60 %	252.440.000
2	18	03	2.01		Optimalnya promosi penanaman modal di kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan LoI	2 laporan	5 laporan	216.500.000	5 laporan	252.440.000
2	18	03	2.01	00 02	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	2 Dokume n	171.500.000	2 Dokume n	209.720.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	03	2.01	00 03	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	8 dokumen	1 Dokume n	45.000.000	1 Dokume n	42.720.000
2	18	04			Optimalnya pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai SOP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100%	96.5 %	368.996.000	96,5 %	300.596.000
2	18	04	2.01		Optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	44283 sk	10000 sk	368.996.000	10000 sk	300.596.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	04	2.01	00 05	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 kegiatan usaha	2 Dokumen	4.996.000	2 Dokumen	1.500.000
2	18	04	2.01	00 06	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	44203 pelaku usaha	10000 Pelaku Usaha	258.000.000	20100 Pelaku Usaha	226.650.000
2	18	04	2.01	00 07	Tersedianya layanan konsultasi terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2386 dokumen	200 Pelaku Usaha	12.000.000	200 Pelaku Usaha	3.450.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	04	2.01	00 08	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan kepatuhan atas komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	238 pelaku usaha	24 Kegiatan Usaha	94.000.000	24 Kegiatan Usaha	68.996.000
2	18	05			Optimalnya pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	211.80 %	96 %	240.000.000	96 %	155.404.000
2	18	05	2.01		Optimalnya kegiatan pengendalian penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	1365 pelaku usaha	278 pelaku usaha	240.000.000	278 pelaku usaha	155.404.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	05	2.01	00 04	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	23 kegiatan usaha	8 Kegiatan Usaha.	62.031.000	8 Kegiatan Usaha.	38.205.000
2	18	05	2.01	00 05	Terlaksananya bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1365 pelaku usaha	262 Pelaku Usaha	131.469.000	262 Pelaku Usaha	79.819.000
2	18	05	2.01	00 06	Terlaksananya pengawasan penanaman modal pelaksanaan pengawasan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	116 kegiatan usaha	19 Kegiatan Usaha	46.500.000	19 Kegiatan Usaha	37.380.000

Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif Induk (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	11	12
2	18	06			Optimalnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	100 %	100 %	30.000.000	100 %	14.800.000
2	18	06	2.01		Optimalnya pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	4 buah	4 buah	30.000.000	4 buah	14.800.000
2	18	06	2.01	00 02	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	14.800.000
J U M L A H										10.163.668.532		10.663.378.532

Penelaahan atas usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan adalah usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yaitu berupa skala prioritas dari tiap tahapan musrenbang. Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan yang digawangi oleh Bappedalitbang kab. Banyumas untuk DPMPTSP tidak ada usulan program kegiatan melalui mekanisme musrenbang dari masyarakat, tetapi dilakukan melalui Forum OPD yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2025, yang menghasilkan masukan dari stakeholder DPMPTSP Kab. Banyumas khususnya dari OPD daerah dan instansi lain yang ada gerainya di MPP Kab. Banyumas. Kemudian masih memungkinkan dari pokir DPRD serta mengakomodir urusan OPD lain yaitu diantaranya terkait Pengarus Utamaan Gender, Kabupaten Layak Anak serta pelayanan untuk disabilitas. Program dan kegiatan yang mendukung hal tersebut yaitu :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Yaitu untuk sarana berupa komponen listrik/penerangan dan peralatan rumah tangga ruang laktasi , bermain anak dan disabilitas

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk mendukung sarana berupa penyediaan Listrik, komunikasi dan air.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk pemeliharaan sarana dan peralatan ruang laktasi, bermain anak, dan disabilitas

4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pengusaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pelaku usaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

Sedangkan Prioritas kegiatan dan pelayanan penanaman modal adalah sebagai berikut

1. Terpenuhinya sarpras MPP untuk pembenahan gerai-gerai pelayanan di MPP yang bagus dan nyaman untuk pelayanan kepada pengunjung mall diantaranya pemenuhan

sarpras yg mumpuni diantaranya peralatan penunjang pelayanan yang diperbarui serta akses internet yang cepat dan stabil, Gedung dan lingkungan Gedung yang nyaman, sehingga akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sehingga anggaran anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarpras sangat dipentingkan.

2. Pelayanan perizinan keliling berupa legalisasi UMKM untuk mendapatkan NIB yg dilakukan jemput bola ke lokasi tertentu, desa, kecamatan atau organisasi lainnya. Sehingga anggaran dialokasikan untk membiayai kegiatan perizinan keliling ini. Untuk kegiatan ini diindikasikan mengalami penurunan obyek legalisasi perizinan karena kegiatan ini telah cukup masiv menggaet para pelaku usaha mikro kecil di wilayah Kab. Banyumas, sehingga s.d. Tahun 2024 telah tercapai 77.373 ribu kegiatan usaha yang memperoleh perizinan (86,91%) yang dicatat dari sejak Tahun 2021 yaitu sejak adanya pelayanan MPP berupa integrasi OSS menjadi OSS RBA, yaitu pencatatan kembali perizinan OSS menjadi OSS RBA sejak adanya MPP di Tahun 2019. Sedangkan jumlah pelaku usaha/keg usaha mikro kecil sejumlah 90.022 ribu pelaku usaha/kegiatan usaha yang ber NIB di Tahun 2022 (sumber data Dinakerkop UKM Kab. Banyumas).
3. Pelayanan Bersama gerai-gerai yg memiliki layanan keliling ke Kec. Terjauh atau dengan akses yang jauh seperti Samsat, KPP Pratama, Bank Jateng, BPJS dll.
4. Diprioritaskan anggaran untuk penyusunan peta potensi investasi serta penyusunan peraturan terkait Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, sehingga memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal di Kab. Banyumas. Arah selanjutnya adalah pemetaan lahan investasi untuk mendukung kemudahan para calon investor untuk memperoleh lahan investasi.
5. Diprioritaskan anggaran untuk promosi investasi berupa promosi offline meliputi promosi yang diselenggarakan oleh APKASI (Asosiasi Kepala Daerah Se Indonesia) di Jakarta, promosi CJIBF (Central Java Investment Bussiness Forum) di Semarang, Promosi Forum Investasi dan one on one meeting dengan mengikutsertakan para pelaku usaha untuk tertarik dalam menanamkan atau mengembangkan inestasinya pada berbagai sektor. Promosi Online melalui media social, website SiGAIB, Baliho, Promosi melalui media cetak seperti surat kabat ataupun majalah, promosi melalui media online melalui televisi dan radio.

Tabel mengenai Rancangan Akhir Renja/RKPD dan analisis kebutuhannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Perubahan
DPMPTSP Kabupaten Banyumas

No.	Usulan Strategis	OPD	Dasar / Keterangan	Rincian Anggaran	Kebutuhan Anggaran
1	Pemeliharaan MPP Kabupaten Banyumas (Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	DPMPTSP	Relokasi Gerai Lapak Aduan Banyumas dan gudang di MPP	Rp 65.000.000	Rp 287.710.000
			Penataan Gerai Pengadilan di MPP	Rp 22.710.000	
			Pemeliharaan Gedung MPP)Paving, Selasar, Kebocoran atap gedung MPP)	Rp 200.000.000	
2	Pemeliharaan jaringan internet DPMPTSP dan MPP (Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya)	DPMPTSP	Pemeliharaan jaringan internet	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung (Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	DPMPTSP	Pengadaan 10 set meja dan kursi	Rp 60.000.000	Rp 772.000.000
			Pengadaan kursi sofa dan barstool	Rp 15.000.000	
			pengadaan komputer 40 Unit (terlampir daftar inventarisir komputer di gerai MPP)	Rp 600.000.000	
			Pengadaan layar monitor antrian 2 unit	Rp 30.000.000	
			Pengadaan meja rapat 2 unit	Rp 20.000.000	
			Pengadaan kursi rapat 28 unit	Rp 42.000.000	
			Pengadaan kursi pimpinan rapat 2 unit	Rp 5.000.000	
4	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota)	DPMPTSP	Digunakan untuk kegiatan promosi pada 5 media cetak dan 5 media elektronik	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Jumlah					Rp 1.115.710.000

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Perubahan

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif					Nasi onal	Daerah
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					8.507.442.000	10.163.668.532	9.547.668.532				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.507.442.000	10.163.668.532	9.547.668.532				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.507.442.000	10.163.668.532	9.547.668.532				
						Meningkatn ya kualitas pelayanan penanaman modal		IKM pelayanan terpadu satu pintu			224.500.000	368.996.000	300.596.000				
									90,75	90,75							
						Meningkatn ya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan		Nilai Investasi Daerah	2800	2800	8.282.942.000	9.794.672.532	9.247.072.532				

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal		persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	98	98	224.500.000	368.996.000	300.596.000				
						Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya		Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	97	97	8.282.942.000	9.794.672.532	9.247.072.532				
1	2	18	01			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Presentase pemenuhan layanan penunjang	97 %	3,513 87,5 97 Nilai Nilai %	7.672.942.000	9.223.172.532	8.799.688.532				

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								urusan perangkat daerah									
	2	18	01	2.01		Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	19.999.100	21.973.000	17.413.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.01	0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.359.100	12.444.000	10.164.000	Kab. Banyumas, Purwokerto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														Timur, Kranji			kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.01	0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.640.000	9.529.000	7.249.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	masyarakat
	2	18	01	2.02		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	undefined	4.164.980.000	5.526.438.532	5.526.438.532			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.02	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.100.000.000	5.461.458.532	5.461.458.532	Kab. Banyumas, Purwokerto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana	-	2. Penurunan pengangguran dan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														Timur, Kranji	Alokasi Umum (DAU)		kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.02	0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	64.980.000	64.980.000	64.980.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	masyarakat
						Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
	2	18	01	2.03		Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	2	18	01	2.03		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian										

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.06		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	-	925.036.400	1.081.374.300	720.613.108			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.06	0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	65.658.500	53.128.500	50.628.500	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.06	0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	15.000.000	17.121.000	17.120.608	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.06	0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	394.074.500	360.204.500	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.06	0005	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000 Paket	10 Paket	59.982.500	46.232.500	39.813.400	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.06	0009	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	161 Laporan	389.999.400	543.367.800	225.396.100	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.06	0010	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2400 Dokumen	2400 Dokumen	0	19.450.000	19.450.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.07		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	192.240.000	9.000.000	9.000.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	atan investasi dan pember dayaan masyara kat
						Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel						0				
	2	18	01	2.07	0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	110.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Kranji	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	2. Penurun an pengang guran dan kemiskin an melalui peningk atan investasi dan pember

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	dayaan masyarakat
	2	18	01	2.07	0010	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	82.240.000	0	0	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	masyarakat
	2	18	01	2.08		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	-	2.015.000.500	2.279.860.700	2.221.697.892			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.08	0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	398.378.000	393.378.000	Kab. Banyumas, Purwokerto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Timur, Kranji			kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0				
	2	18	01	2.08	0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	39 Laporan	39 Laporan	1.765.000.500	1.881.482.700	1.828.319.892	Kab. Banyumas, Purwokerto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Umum Kantor yang Disediakan						Timur, Kranji			dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.09		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis	-	355.686.000	304.526.000	304.526.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	112.536.000	81.536.000	81.536.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.09	0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	66 Unit	99.930.000	72.070.000	72.070.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.09	0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	92.400.000	100.100.000	100.100.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.09	0010	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.820.000	50.820.000	50.820.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	01	2.09	11	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel										

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		Persentase peningkatan investasi daerah		2							
								Nilai Investasi Daerah		2.043							
								Nilai IKM penanaman modal		89,6							
6	2	18	02			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	100 %	100 %	80.000.000	85.000.000	74.740.000				

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	02	2.01		Optimalnya penyusunan kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	2 dokumen	100 %	15.000.000	20.000.000	14.832.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
						Optimalnya kegiatan kemitraan berusaha											

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	02	2.01	0001	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	02	2.01	0003	Terlaksananya Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	20.000.000	14.832.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	02	2.02		Optimalnya kajian potensi investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	3 dokumen	100 %	65.000.000	65.000.000	59.908.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	02	2.02	0001	Tersedianya peraturan daerah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	23.480.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	02	2.02	0004	Tersedianya peta potensi dan investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	36.428.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
7	2	18	03			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol	60 %	60 %	117.000.000	216.500.000	202.440.000				
	2	18	03	2.01		Optimalnya promosi penanaman modal di kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan Lol	5 laporan	60 %	117.000.000	216.500.000	202.440.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																	melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	03	2.01	0002	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	97.000.000	171.500.000	159.720.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	03	2.01	0003	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	45.000.000	42.720.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
8	2	18	04			Optimalnya pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai SOP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	96.5 %	96,5 %	224.500.000	368.996.000	300.596.000				

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	04	2.01		Optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	10000 sk	98 %	224.500.000	368.996.000	300.596.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	04	2.01	0005	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/inseentif bagi kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Inseentif yang menjadi	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	4.996.000	1.500.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						usaha dari pelaku usaha		Kewenangan Kabupaten/ Kota									atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	04	2.01	0006	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	20100 Pelaku Usaha	132.000.000	258.000.000	226.650.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	04	2.01	0007	Tersedianya layanan konsultasi terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	24 Kegiatan Usaha	52.500.000	12.000.000	68.996.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	04	2.01	0008	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan kepatuhan atas komitmen	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	24 Kegiatan Usaha	200 Pelaku Usaha	20.000.000	94.000.000	3.450.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha		berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha									atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
9	2	18	05			Optimalnya pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	96 %	96 %	393.000.000	240.000.000	155.404.000				
	2	18	05	2.01		Optimalnya kegiatan pengendalian penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan	278 pelaku usaha	96 %	393.000.000	240.000.000	155.404.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								dan pengawasan									peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	05	2.01	0004	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	50.000.000	62.031.000	38.205.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	05	2.01	0005	Terlaksananya bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	262 Pelaku Usaha	262 Pelaku Usaha	288.000.000	131.469.000	79.819.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	05	2.01	0006	Terlaksananya pengawasan penanaman modal pelaksanaan pengawasan penanaman modal bagi kegiatan	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil	19 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	55.000.000	46.500.000	37.380.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						usaha dari pelaku usaha		dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha									atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
10	2	18	06			Optimalnya pemanfaatan dan inormasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	100 %	100 %	20.000.000	30.000.000	14.800.000				

No	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	06	2.01		Optimalnya pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	4 buah	100 %	20.000.000	30.000.000	14.800.000			-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	2	18	06	2.01	0002	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	30.000.000	14.800.000	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningk

N O	Kode					Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Target 2025		Pagu Indikatif						
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasi onal	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									atan investasi dan pemberdayaan masyarakat
	JUMLAH										8.507.442.000	10.163.668.532	9.547.668.532				

BAB IV. PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan, Renja OPD dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan periode anggaran. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang.

Renja OPD akan sangat berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan, apabila anggaran tidak tersedia secara maksimal maka perlu analisa lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran, sehingga target kinerja dan standar pelayanan yang ditetapkan dicapai. Analisa yang dibutuhkan terhadap Renja adalah program-program dan aktifitas yang akan mendukung terwujudnya tujuan dari pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Perubahan merupakan renja masa peralihan antara RPD 2024-2026 dengan RPJMD 2025-2029. Sehingga Renja 2025 Perubahan mengacu pada RPD 2024-2026 dan sebagian mengacu pula pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Rancangan Renstra DPMPTSP 2025-2029. Dimana ini merupakan periode baru setelah periode RPD Peralihan Kabupaten Banyumas 2024-2026.

Dengan rancangan akhir renja 2025 perubahan ini akan menjadi acuan bagi terlaksananya tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan harapan akan mencapai target kinerja penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah ditetapkan.

Purwokerto, 26 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



KRIS SINDHARA KUSUMAWATI, S.STP
Pembina

NIP. 198003151999122001

LAMPIRAN
REGISTER RISIKO STRATEGIS DPMPTSP TAHUN 2025

No	Sasaran/ Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	1	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Kurang optimalnya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas insentif terhadap pelaku usaha	Kurangnya minat pelaku usaha mengajukan pemberian fasilitas insentif	DPMPTSP, Pelaku Usaha	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan upaya jemput bola kepada pelaku usaha	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pembahasan atas perbaikan atas Perbup Insentif dan kemudahan berusaha, serta kegiatan pencarian dan Upaya jemput bola kegiatan usaha yang memenuhi syarat	Bidang PIPPM	Triwulan II

No	Sasaran/ Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2		Pelaku usaha tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya	Kurangnya pembinaan dan cara-cara dalam menyelesaikan kendala realisasi investasi dan pelaporan penanaman modal	Realisasi Investasi rendah	DPMPTSP , masyarakat	Telah melakukan fasilitasi melalui forum rapat dg pelaku usaha terkait hambatan perizinan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan identifikasi permasalahan dan kendala yang tidak ada laporan dan kegiatan /pertemuan penyelesaian dengan pelaku usaha dengan dasar pengolahan data pembandingan realisasi perizinan dan LKPM/SIMIKE	Bidang Daldatin	Triwulan II
		3		Tidak terintegrasinya data perizinan dan non perizinan dalam pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data	Kurang optimalnya dalam pengelolaan data secara elektronik	Penyajian dan pemanfaatan data tidak sesuai kebutuhan organisasi	DPMPTSP	Melakukan pengolahan data dari OSS RBA, serta usulan aplikasi ke Dinkominfo	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan identifikasi dan pengolahan data yang dibutuhkan OPD	Bidang Daldatin	Triwulan II

No	Sasaran/ Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3		Pemberian Gratifikasi	Adanya peluang/kele- mahan pengawasan	1. Dampak Reputasi 2. Dampak Hukum 3. Dampak Kinerja	Pelaku usaha dan DPMPTSP	Pengendalian oleh UPG dengan atas FRA, memasang kotak makanan/minu- man gratis untuk pengunjung dari gratifikasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan identifikasi Gratifikasi dan kecurangan yang mungkin timbul serta melakukan pengawasan atas gratifikasi dan kecurangan	UPG	Triwulan II

N o	Sasaran/ Kegiatan	N o	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah	E/KE /TE	Celah Pengen- dalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Rencana a Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	Sedikitnya pelaku usaha yang memperoleh Insentif/ke- mudahan berusaha/kerjasama kemitraan	Pelaku usaha kurang informasi terkait insentif/ke- mudahan berusaha/kerjasama kemitraan	Motivasi para pelaku usaha menjadi stagnan untuk kemajuan usaha	DPMP TSP, Pelaku Usaha	Melakukan Sosialisasi melalui pertemuan ataupun melalui media yang lain	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu mengurangi risiko yang teridentifikasi	Mengusulkan revisi atas perbup Insentif dan Kemudahan Berusaha, Upaya jemput bola kepada pelaku usaha	Bidang PIPPM, Pelayanan PM	Bidang TW II, TW III

N o	Sasaran/ Kegiatan	N o	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah	E/KE /TE	Celah Pengen dalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Rencana a Waktu Pelaksanaan
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	Rendahnya kualitas peta potensi investasi	Tidak adanya kajian-kajian investasi berupa kajian internal dan kajian akademis	Image/gambaran dan respon terhadap peta potensi investasi dari calon investor kurang bagus	DPMP TSP, calon investor	Melakukan pemetaan kembali terhadap potensi unggulan dan adanya kajian-kajian terhadap potensi unggulan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan kajian peta potensi unggulan berbasis IPRO	Bidang PIPPM	TW III

N o	Sasaran/ Kegiatan	N o	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah	E/KE /TE	Celah Pengen dalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Rencana a Waktu Pelaksanaan
3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan Lol	Promosi tidak menghasilkan Lol	Promosi investasi tidak lengkap dan detail dalam menyajikan potensi investasi yang ditawarkan	Kemintaan atas investasi tidak berkembang	DPMP TSP, pelaku usaha	Kualitas promosi ditingkatkan dengan menyajikan hasil-hasil pengkajian investasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyajikan promosi pada saluran promosi pameran, forum investasi, one on one meeting, web, media cetak dan media elektronik	Bidang Daldatin	TW III, TW IV

N o	Sasaran/ Kegiatan	N o	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah	E/KE /TE	Celah Pengen- dalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Rencana a Waktu Pelaksanaan
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	Kurang optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya	Realisasi Investasi Rendah	DPMP TSP, Pelaku Usaha	Rapat pengawasaan perijinan, Bimtek LKPM dan pengawasaan rutin insidentil kegiatan usaha	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan Penyelesaian permasalahan kendala realisasi investasi, Bimtek dan bimbingan langsung LKPM, pengawasan rutin dan insidentil kegiatan usaha	Bidang Daldatin	TW II

N o	Sasaran/ Kegiatan	N o	Indikator Kinerja Sasaran/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Rencana a Waktu Pelaksanaan
5	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	Pemberian gratifikasi dari pemohon pada saat proses pemberian izin	Tekanan eksternal	1. Dampak Reputasi 2. Dampak Hukum 3. Dampak Kinerja 4. Dampak Budaya	DPMP TSP	Kotak makanan.minuman gratifikasi untuk diberikan kepada pengunjung MPP, Laporan UPG	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu	Kotak makanan.minuman gratifikasi untuk diberikan kepada pengunjung MPP, Laporan UPG	Bidang Perekonomian Kesra dan Sektor PM dan Sektor Pembangunan, UPG	TW II